



# KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul	: Kemendagri Akui Lobi-Lobi ASN Bisa Terjadi
Tanggal	: Selasa, 19 April 2022
Surat Kabar	: Media Indonesia
Halaman	: 3

## Kemendagri Akui Lobi-Lobi ASN Bisa Terjadi

Para partai politik disinyalir bakal memanfaatkan momentum penunjukan penjabat kepala daerah untuk persiapan Pemilu 2024.

INDRIANI ASTUTI  
indriyani@mediaindonesia.com

**K**EMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) mengajak publik mengawal bersama-sama proses pengisian penjabat kepala daerah. Pada 2022 akan ada 101 kepala daerah yang habis masa jabatannya, 7 di antaranya gubernur.

Kepala Puslit Penerangan Kemendagri Benni Irwan mengemukakan hal itu saat merespons adanya dugaan upaya lobi-lobi oleh aparat sipil negara (ASN) yang ingin mengisi jabatan tersebut. Ia mengakui bisa saja ada pihak yang berusaha melakukan lobi, tetapi itu tidak akan membahayakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

"Upaya orang bermacam-macam, ada yang mendekati ini itu yang dipikir bisa memengaruhi Mendagri. Tapi tidak mempan karena kita ingin menjaga keibuanan Kemendagri," tegas Benni.

Ia menjelaskan pengangkatan penjabat kepala daerah telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Pemerintahan Daerah, UU Pilkada, dan UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain itu, pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 6/2005 tentang Penetapan Pengesahan Perangkat Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta PP No 4/2000 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor

6/2005.

"PP menjadi rujukan untuk menentukan kriteria, indikator, tugas, dan kewenangan hal yang boleh dan tidak boleh. Semua pihak memahami itu. Kita mengharapkan publik mengikuti prosesnya," terang Benni.

Untuk pengisian jabatan gubernur, Benni mengatakan Mendagri Tito Karnavian, sesuai aturan mengusulkan tiga nama pada presiden.

Kemudian, untuk pengisian penjabat bupati dan wali kota, gubernur yang akan mengusulkan nama pada Mendagri untuk disetujui presiden. Kemendagri, ujar dia, turut menerima masukan dari publik, mulai masyarakat, asosiasi, hingga DPR tentang nama-nama calon penjabat.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Tribus Rahardiansyah mengatakan adanya dugaan politik uang dalam penempatan penjabat kepala daerah tersebut logis. Hal itu lantaran para calon penjabat daerah ini diberikan keleluasaan untuk memberikan kebijakan penyusunan APBD.

"Sehingga mereka bernafta. Di sini khususnya ASN untuk bupati dan wali Kota. Di sini mereka berlomba-lomba," papar Tribus kepada *Media Indonesia*, kemarin.

Menurutnya, para partai politik juga belum menentukan kandidat, namun penunjukan penjabat kepala daerah tersebut butuh persiapan Pemilu

2024. "Tidak adanya transparansi, jadi problem sendiri. Penunjukannya khusus karena kriteria hanya ASN eselon 1 untuk gubernur dan eselon dua untuk wali kota," ujarnya.

Tribus pun meminta kepada lembaga hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga hukum lainnya untuk turun langsung dan memberikan pengawasan yang ketat. KPK dan lembaga hukum lainnya perlu ikut mengawasi mulai dari perekutan hingga pelaksanaan tugas penjabat kepala daerah.

### Bahas anggaran

Dalam kaitan persiapan Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah meninjau usulan anggaran untuk cliauran pada rapat dengan DPR dan pemerintah berikutnya. Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyampaikan pihaknya akan melakukan konsinyering pada 21-23 April mendatang.

"Konsinyering akan membahas detail-detalinya tahapan. KPU juga nanti akan menyisir anggaran," ungkap Hasyim di Gedung KPU, Jakarta, kemarin.

Awalnya KPU mengusulkan Rp86 triliun. Namun, pemerintah keberatan karena upaya pemulihannya dari dampak covid-19 masih perlu dana besar.

KPU pun memangkas usulan anggaran menjadi Rp76,6 triliun dan kini masih mengeyakkan penghematan di sejumlah pos anggaran sesuai keinginan pemerintah.

Hasyim mengatakan KPU juga menyerahkan rencana anggaran ke KPK. KPK terbaru akan rampung pada Mei mendatang. (Ykb/P-2)



MUHAMMAD SAFIUL

**MENANG DI PEMILU 2024:** Anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem Dapil Jember-Lumajang Charles Meikyansyah (tengah) berfoto bersama pengurus seusai pelantikan ratusan pengurus DPD, DPC Partai NasDem Kabupaten Lumajang oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Jawa Timur Sri Sajek Sudjunadi di Lumajang, Jatim, Minggu (17/4). Partai NasDem menargetkan memenangi Pemilu 2024 di Lumajang.